

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Kemiskinan sampai saat ini masih saja menjadi masalah yang sangat sering terjadi dan sulit untuk diatasi oleh setiap negara, tak terkecuali di negara Indonesia sendiri kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan dari laporan Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia pada september 2018 mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih cukup besar, baik itu dalam nilai absolut maupun tingkat (rasio) kemiskinan. Pada bulan Maret 2018, 61,9% penduduk miskin terdapat di daerah pedesaan dengan tingkat kemiskinannya sebesar 13.2%. Dan itu membuktikan bahwa masalah kemiskinan ini tidak boleh disepelekan.

Tingkat kemiskinan yang terjadi di desa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya informasi karena daerah yang sulit untuk dijangkau, banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat. Kalau dilihat dari lima tahun belakangan yaitu tahun 2015-2019, angka kemiskinan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengalami penurunan, dengan adanya penambahan anggaran dana dan perbaikan desa yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun kemiskinan di desa sudah mengalami penurunan, tapi tetap saja permasalahan tentang kemiskinan ini tidak boleh kita abaikan. Pemerintah harus tetap mencari solusi untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan ini, karena tingkat kemiskinan juga bisa

menjadi ukuran bagaimana kinerja pemerintah dalam menanggapi permasalahan kemiskinan ini. Bahkan, kemiskinan juga dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan sebuah negara. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan ini harus bisa diselesaikan dengan baik dan tepat supaya bisa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sebuah desa itu terdiri dari suatu kumpulan dari masyarakat yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan pemerintahannya sendiri dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat undang-undang diatas pemerintah akan mengalokasikan dana desa dengan cara mentransfer ke Kabupateh/Kota yang ada di Indonesia. Dengan adanya UU tersebut, itu artinya desa sudah diberikan kewenangan terhadap sumber dana yang telah diberikan yang diharapkan bisa memperbaiki perekonomian yang ada di desa serta dapat mengurangi ketimpangan antara di desa dan di kota.

Dana desa pertama kali didistribusikan pada Tahun 2015 dan pemerintah telah berupaya meningkatkan jumlah dana desa setiap tahunnya. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, sudah dialokasikan dana desa sebesar Rp.258 triliun. Dari pelaksanaan dana desa tersebut telah dapat dirasakan manfaat nyata bagi masyarakat desa, yaitu salah satunya telah banyak infrastruktur yang dibangun di daerah pedesaan seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas serta pemberian modal dan pelatihan terhadap masyarakat yang ada didesa. Hal ini didukung dengan kebijakan PP No 8 2016 tentang dana desa yang berasal dari Anggaran pendapatan belanja negara (APBN)

yang diberikan untuk desa, kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang telah dirancang pemerintah, dan juga untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Berdasarkan Kebijakan diatas, maka dana desa tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik/infrastruktur desa saja, tetapi juga berfokus kepada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa ini, diutamakan untuk dikelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku lokal, agar penduduk desa memiliki produk khas asal daerahnya sendiri. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga bisa mempekerjakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Kemudian dana desa juga diperuntukkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada kader yang ada didesa agar kinerja nya bisa lebih optimal. Oleh sebab itu, untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat, agar bantuan dana desa yang berikan oleh pemerintah bisa terealisasikan dengan baik dan bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 , mengatakan bahwa pembangunan desa itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat agar bisa menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat yang ada didesa . Sebelum dilakukannya pembangunan, pemerintah akan membuat strategi perencanaan agar pembangunan bisa di selesaikan dengan baik dan benar supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Pada dasarnya yang dimaksud dari pembangunan

ekonomi itu adalah upaya dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, serta pendistribusian pendapatan masyarakat yang merata, agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa ke pemerintah Presiden Jokowi saat ini, salah satu programnya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa bersaing ditingkat Nasional maupun Internasional. Kemudian pembangunan infrastruktur bertujuan untuk membantu memudahkan aktivitas masyarakat, termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan memudahkan aksesibilitas masyarakat desa. .

Untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan pendapatan masyarakat, tentu sangat diperlukan data PDRB untuk bisa melihat berapa banyak barang yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah dengan berbagai aktivitas ekonomi yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga bisa dijadikan sebagai patokan dalam membuat suatu rancangan pembangunan nasional.

Pada tahun 2019 Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada bulan september 2019, BPS telah mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta jiwa, dengan persentasenya sebesar 9,22%. Meski jumlah orang miskin turun, namun disparitas kemiskinan antara

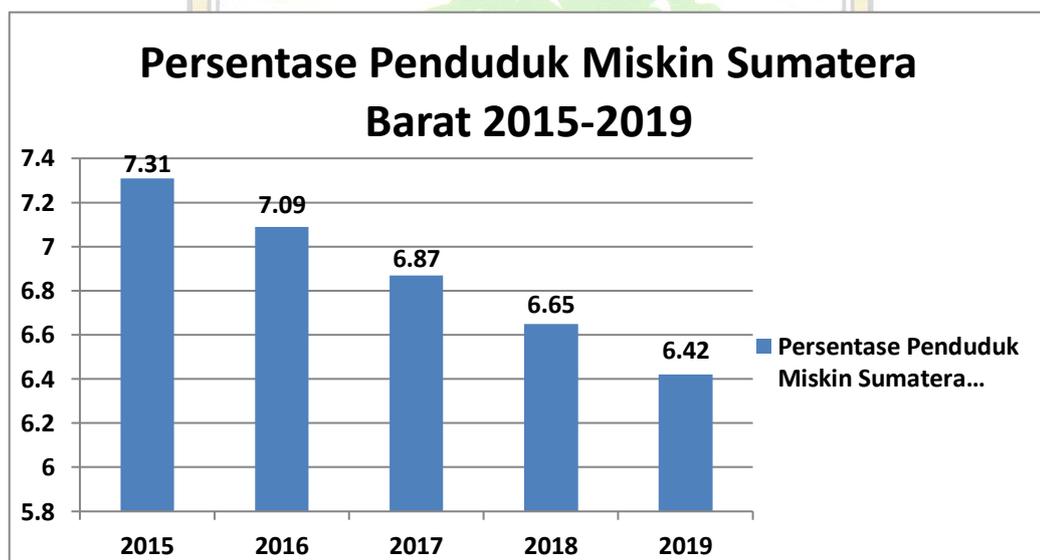
desa dan kota masih saja tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan di kota sebesar 6,52%. Sementara, persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,6%. Kondisi ini tidak jauh berbeda ditahun 2018. Oleh karena itu, tujuan dari penggunaan dana desa adalah untuk bisa membantu memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di desa, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya, agar mengurangi ketimpangan antara di desa dan di kota, sehingga penduduk yang tinggal di desa tidak ketinggalan informasi dan mampu bersaing dengan masyarakat yang ada di kota maupun di luar negeri.

Dengan adanya program bantuan dana desa ini, diharapkan bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan. Jika selama ini dana desa lebih di prioritaskan untuk pembangunan fisik, maka kali ini program untuk pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi agar bisa seimbang antara pembangunan infrastruksur dengan pembangunan sumber daya manusia/pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di desa dengan cara membuat program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat desa. Tidak hanya sekedar pemberian modal saja, tetapi juga melatih dan meningkatkan kompetensi sdm dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya.

Kemiskinan memang merupakan masalah yang sangat sulit untuk dihilangkan dan dapat terjadi di daerah manapun, tidak terkecuali dengan Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Provinsi Sumatera Barat terkenal akan sumber daya alam yang melimpah yang memiliki perairan pantai barat serta banyak memiliki kehidupan laut sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi dengan beberapa hasil

perikanan laut andalan. Namun kenyataannya Provinsi Sumatera Barat masih belum bisa terlepas dari masalah kemiskinan, terutama didaerah pedesaan yang rata-rata pekerjaan masyarakatnya hanya sebagai buruh tani. Kurangnya lapangan pekerjaan yang ada membuat angka kemiskinan menjadi tinggi, oleh sebab itu diharapkan dengan adanya dana desa ini, bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa dengan cara memberikan permodalan, serta pelatihan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Berikut persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.

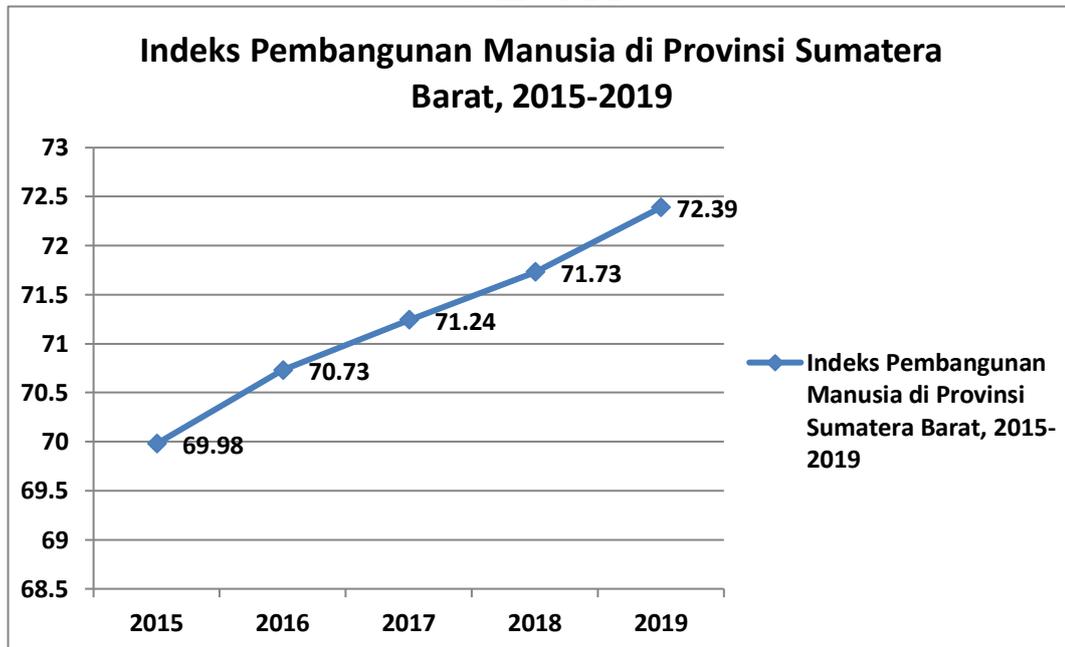
Gambar 1.1



Dilihat dari tabel 1, menunjukkan angka persentase penduduk miskin rata-rata dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan, walaupun pengurangan angkanya tidak terlalu signifikan. Persentase penduduk miskin yang cukup baik atau rendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka sebesar 6,42%. Sedangkan di tahun 2015 sebesar 7,31%. Dapat kita lihat, dengan angka tersebut menandakan bahwa pemerintah sudah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ada

di Sumatera Barat dengan adanya penurunan angka persentase kemiskinan tiap tahunnya.

Gambar 1.2



Sumber : BPS Sumbar, 2019.

Dilihat dari tabel 2, menunjukkan tingkat IPM di Sumatera Barat selalu meningkat tiap tahunnya. Puncaknya yaitu pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia di Sumbar sebesar 72,39. Dengan adanya peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat sudah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya dilakukan analisis tentang bagaimana pengaruh dari dana desa yang telah diberikan terhadap kemiskinan dan juga untuk mengukur sejauh mana Pemerintahan desa mampu merealisasikan dana desa tersebut dengan tepat yang juga sesuai dengan rancangan program yang telah dibuat, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, lalu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, dan juga prioritas program

yang akan ditetapkan oleh pemerintah desa. Dari ulasan yang telah dibahas diatas, maka peneiliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul “Analisis pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusuan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh dari dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak dari dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumater Barat, apakah dengan adanya dana desa ini, bisa mengurangi disparitas kemiskinan antara di desa dan di kota.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak/pengaruh dana desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Apakah bisa meningkatkan kehidupan masyarkat desa atau tidak ada perubahan sama sekali setelah diberikannya dana desa.